



PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

**TAHUN
2021**



**LAPORAN
KINERJA**
Instansi Pemerintah

**BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018, LKjIP Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

KATA PENGANTAR

Cakupan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 terdiri atas Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja,

memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 14 Februari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BONE



H. NAJAMUDDIN, S.Sos., MM

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP :19631007 198611 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. UMUM | 1 |
| B. ORGANISASI | |
| 1. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD | 5 |
| 2. Struktur Organisasi | 5 |
| C. ISU STRATEGIS | 10 |
| D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 13 |
| A. TUJUAN DAN SASARAN | 14 |
| 1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah | 14 |
| 2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 14 |
| B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 15 |
| 1. STRATEGI | 15 |
| 2. ARAH KEBIJAKAN | 16 |
| C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | 17 |
| D. PERJANJIAN KINERJA | 18 |
| E. STANDAR PENILAIAN KINERJA | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 21 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 22 |
| 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 | 23 |
| 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 -2021 | 24 |
| 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra | 27 |
| 4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan | |
| 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 29 |
| 6. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja | 32 |
| 7. Upaya Perbaikan Berikutnya | 34 |
| 8. Layanan Administrasi Perkantoran | 37 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 38 |
| BAB IV PENUTUP | 40 |
| A. Simpulan Umum | 40 |
| B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi | 40 |

BAB I

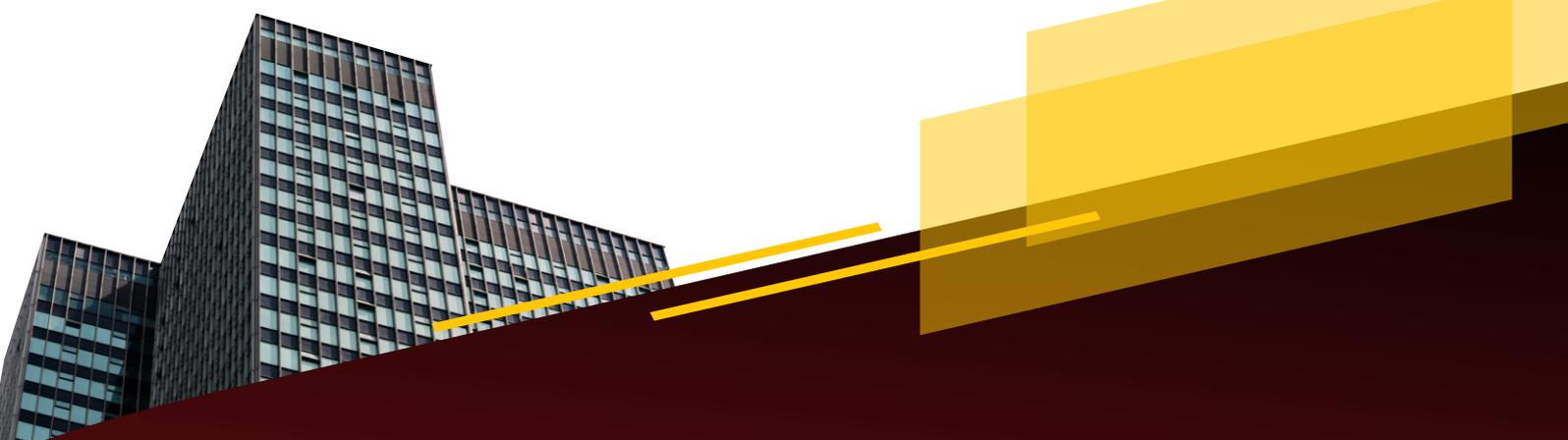
PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap.MPRRI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan



efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Bone. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban BKAD untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dan disusun pada periode Tahun 2018-2023. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggung jawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-



tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

LKjIP ini merupakan bentuk formal pertanggung jawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang bermanfaat untuk:

- a. Mewujudkan rumusan kebijakan perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang terpadu dan realistis.
- b. Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan baik yang bersifat kewilayahan maupun sektoral.
- c. Menyerahkan kegiatan pengelolaan keuangan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- d. Mewujudkan keseimbangan keuangan antar wilayah dan sektor sesuai dengan unit kerjanya.
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya.

LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.
3. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang

- 
- Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Bone
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021
 6. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021

B. ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, Maka Perlu dilakukan Penataan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan



Keuangan dan Aset Daerah Sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Perkembangan Peraturan Perundang – Undangan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati No 94 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Badan keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Komposisi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, meliputi personil yang mengisi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai BKAD adalah 118 pegawai terdiri dari 61 PNS dan 57 Non PNS. Dilihat dari jenis kelamin pegawai PNS BKAD, pegawai laki-laki 30 Orang dan 31 Orang perempuan. Dan Non PNS Laki laki 33 Orang dan Perempuan 24 Orang, Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

GAMBAR 1.1

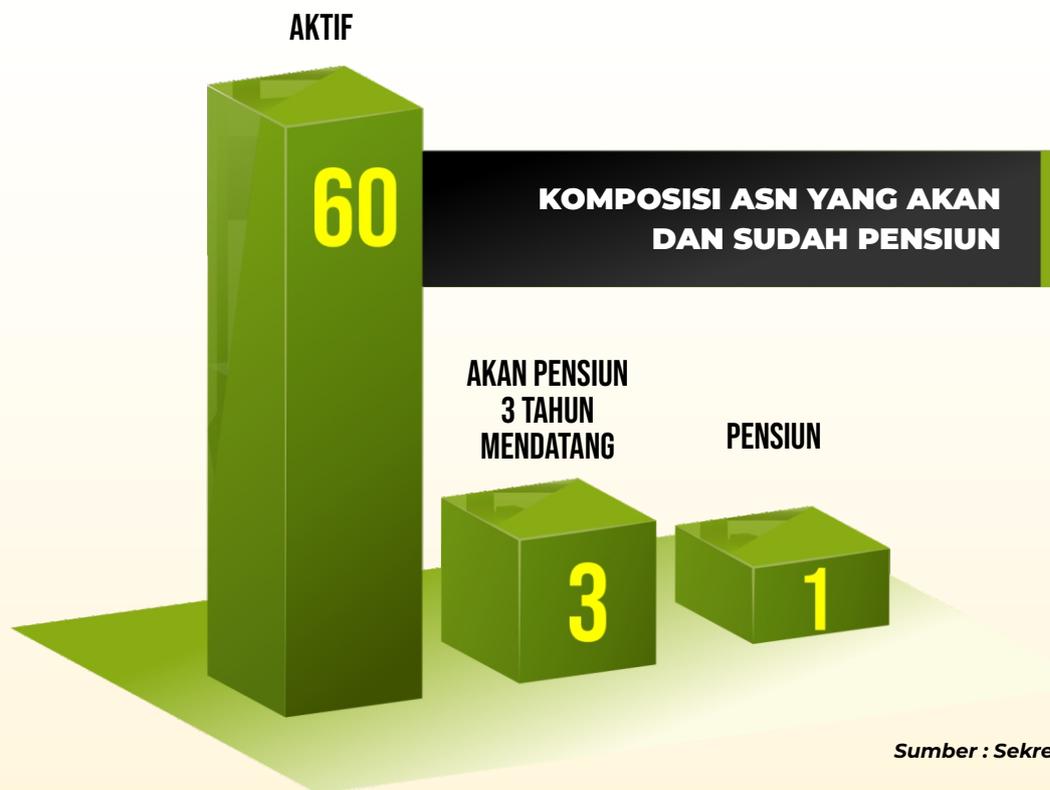


KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

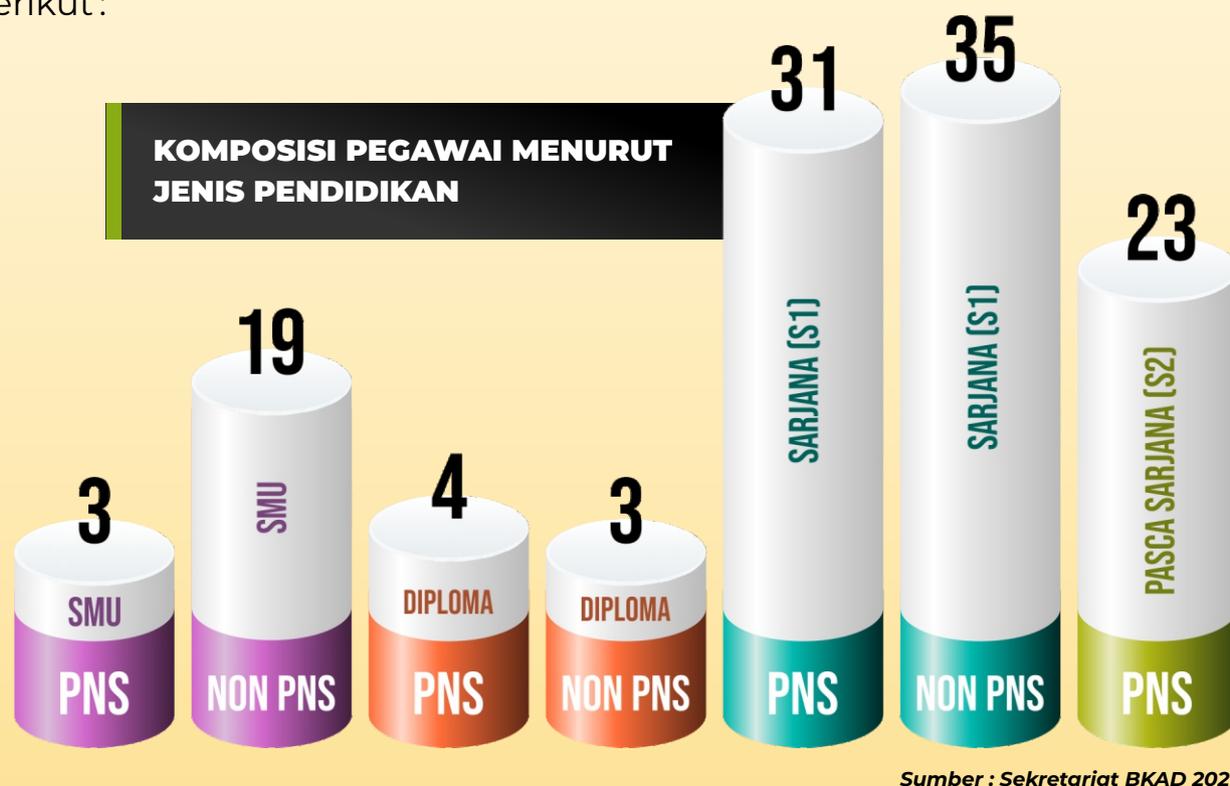


Sumber : Sekretariat BKAD 2021

Jika Dilihat berdasarkan Status Aktif Pegawai BKAD, dari 61 Pegawai yang terdaftar, Terdapat 1 Orang yang sudah Pensiun, dan Dalam 3 Tahun Mendatang ada 3 Pegawai yang juga akan Pensiun, yang selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

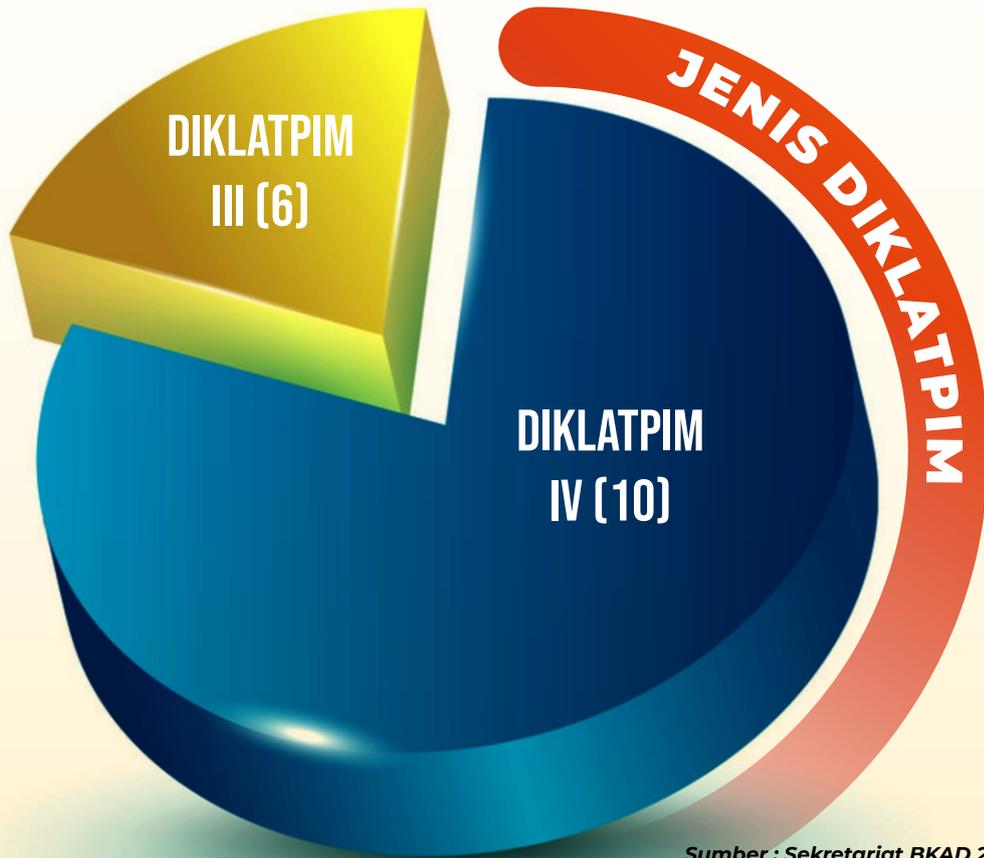


Jika dilihat berdasarkan pendidikan sebagian besar pegawai BKAD adalah sarjana S-1 yaitu sebanyak 57,89 %, S-2 sebanyak 33,33 %, lulusan SLTA sebanyak 3,51 %, Diploma 5,26 % . Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



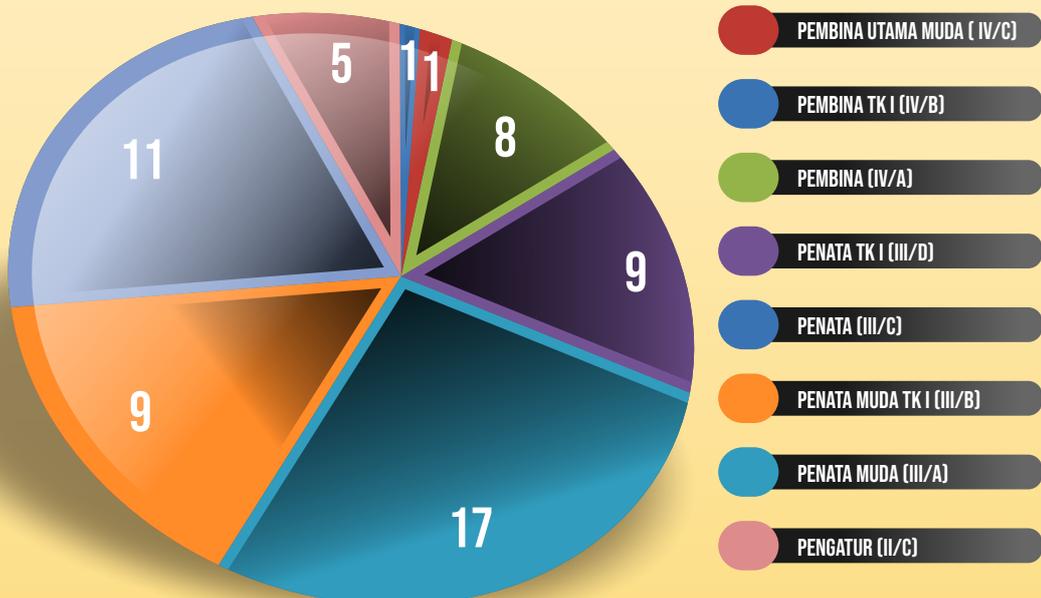
Secara berkala pegawai BKAD mengikuti diklat struktural. Hingga tahun 2021, jumlah yang mengikuti diklatpim sebanyak 16 pegawai, yaitu diklatpim III dan IV sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :

JUMLAH PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL



Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan ruang terbanyak adalah golongan III/c yaitu sebanyak 15.89 %, lainnya merata sebagaimana teruang dalam grafik 4 berikut :

KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN RUANG

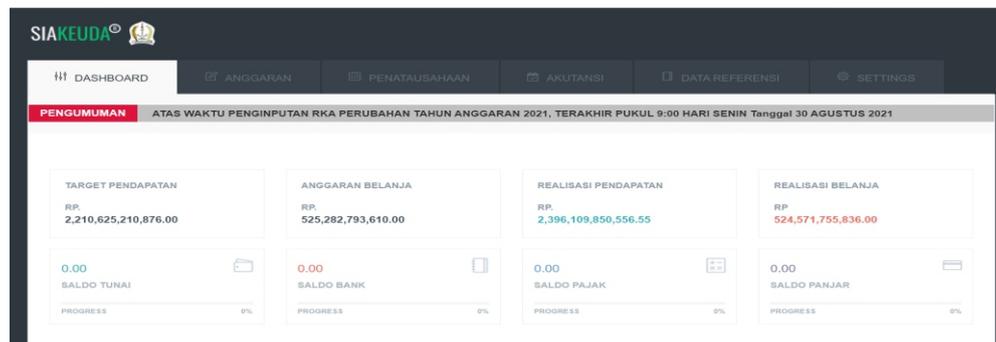


C. ISU STRATEGIS

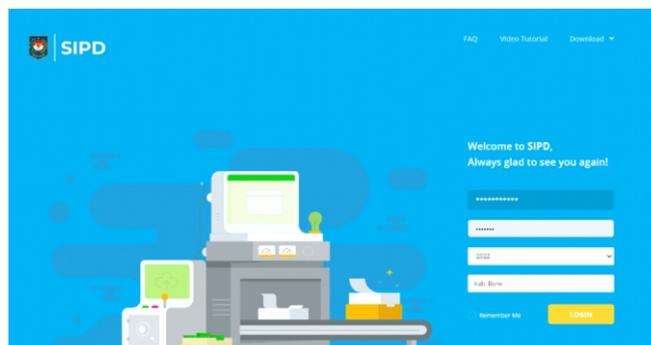
Isu Strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2021 adalah :

- 1** **PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BELUM MEMADAI**
- 2** **KURANG TERTIBNYA MEKANISME INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) OLEH PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA BARANG**
- 3** **BELUM OPTIMALNYA PEMNFATAAN DAN PEMINDAHTANGANAN**
- 4** **BELUM TERSEDIANYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL DAN PROFESSIONAL**
- 5** **KHUSUS ASET TANAH MASIH TERDAPAT BEBERAPA BIDANG TANAH YANG BELUM DILENGKAPI DOKUMEN KEPEMILIKAN YANG SAH (SERTIFIKAT) DAN ASET TANAH YANG TELAH DILENGKAPI DOKUMEN KEPEMILIKAN AKAN MEMBERI NILAI TAMBAH ATAS ASSET TERSEBUT**
- 6** **UNTUK KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT MASIH TERDAPAT BEBERAPA KENDARAAN YANG TIDAK MEMILIKI KEPEMILIKAN (BPKB)**
- 7** **MASIH TERDAPAT BARANG MILIK DAERAH (KENDARAAN DINAS) YANG MASIH DIKUASAI ORANG YANG TIDAK BERHAK , SERTA ORANG YANG SUDAH PENSIUN**

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI



Sejak tahun 2007 sampai 2021 BKAD menggunakan Sistem Aplikasi SIAKUDA yang berbasis online dalam penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan, tahun 2021 menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih bergandengan dengan Aplikasi SIAKUDA dimana sistem penganggaran dan penatausahaan kurang sinkronnya penganggaran dan Penatausahaan dalam penyelesaian aset, pengadaan barang dan Jasa, dan daya serap anggaran yang kecil, selain itu juga diperkuat dengan kurangnya akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Permasalahan tersebut pada dasarnya berkaitan antara lain dengan permasalahan Infrastruktur yang kurang memadai, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.





Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem Onspam (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yaitu aplikasi yang mengintegrasikan Pelaporan DAK Fisik dan Aplikasi ALADIN (Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik) sebagai alat bantu SKPD untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Aplikasi terintegrasi tersebut terus dikembangkan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD Kab. Bone, dan yang kedua yaitu Sim Gaji Taspen, aplikasi yang berbasis digital untuk menampilkan informasi proses pelayanan Bendahara Umum Daerah. Aplikasi tersebut dikembangkan untuk mempermudah mengetahui jalannya proses pelayanan pada Bendahara Umum Daerah dalam Pengelolaan Gaji dan tunjangan PNS pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bone.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

KOMPONEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)





A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

“MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL SECARA BERKESINAMBUNGAN”

Indikator :

- Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD

2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran BKAD dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:



- Sasaran 1 :** Meningkatnya Kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Indikator :** Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP
- Sasaran 2 :** Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi
- Indikator :**
 1. Penyusunan dan Penetapan APBD/ Perubahan APBD tepat waktu
 2. Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat Waktu
 3. Asset Manajemen

Matrix Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET JANGKA MENENGAH | REALISASI KINERJA | | |
|--|---|---|------------------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan | | Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | WTP | WTP | WTP | |
| | Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dalam Pemerintahan Daerah | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | BB | BB | BB | |
| | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Asset Manajemen | 100 | 99.17% | 99.35% | 99.85 |

Sumber : Rencana Strtegis Perubahan Tahun 2018-2023

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan-

mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone memiliki Strategi dalam perumusan Perencanaan secara Komperensif untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien, melalui pendekatan yang komperenshif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melkukan transformasi , reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam ari dapat menjadi intrumen monitoring dan Evaluasi pembangunan.Adapun Strategi pembangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam kurung waktu tiga tahun kedepan adalah meningkatkan kualitas perencanaan Penganggaran Daerah dalam Pembangunan Daerah.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengembangan daerah mempunyai arah kebijakan dimana pada tahun 2021 arah kebijakan dengan pelayanan publik yang berbasis tehnologi informasi.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel secara Berkesinambungan | - Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Pemerintahan Daerah - Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang bersih, Transparan Efektif, dan Akuntabel dan Berbasis Tehnologi Informasi | Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah | Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi | Peningkatan kualitas pelayanan publik | Peningkatan kualitas pelayanan publik |

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD-P 2021

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Keuangan dan Aset Daerah Telah Menetapkan IKU Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut:

IKU Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET CAPAIATN SETIAP TAHUN | | | |
|----|--|---|---|-------------|------------------------------|------|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan | | Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 1 | | Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Predikat | BB | BB | BB | A |
| 2 | | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Asset Manajemen | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber data: Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan data diatas Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 mempunyai Tujuan yaitu untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel secara Berkesinambungan dengan Indikator Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan dua Sasaran dimana sasaran pertama Meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah dengan Indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP, sedangkan Sasaran ke dua dengan 3 Indikator yaitu Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu, Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu, Asset Manajemen.



D. PERJANJIAN KINERJA

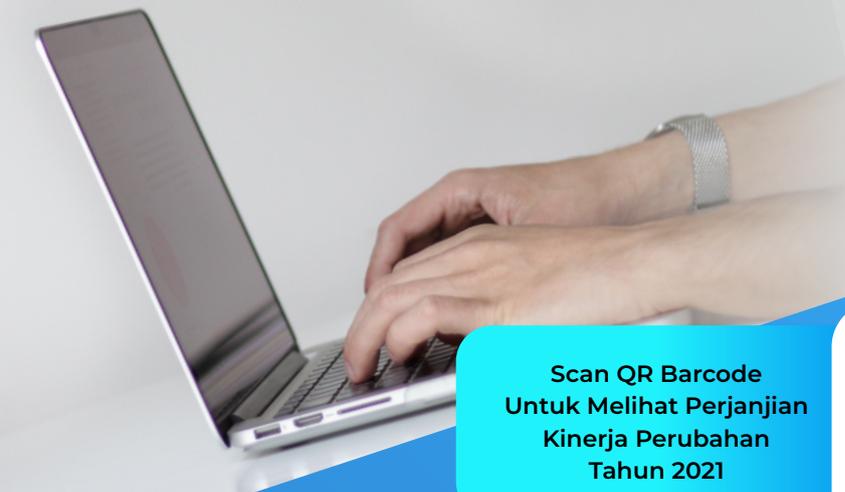
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | PROGRAM | ANGGARAN |
|--|---|---|-------------|-------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan | | Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Opini | WTP | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Predikat | BB | | |
| | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | |
| | | Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | |
| | | Asset Manajemen | % | 100 | | |
| | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota | 43,598,499,390 |
| | | | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 480,235,129,590 |
| | | | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1,449,164,630 |
| | | | | | Jumlah | 525,282,793,610 |

Sumber data : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas Bahwa pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang Akuntabel secara berkesinambungan maka Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai dua sasaran, sasaran pertama dengan satu Indikator yaitu Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan Program Kegiatan Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran Sebesar Rp. 43.598.499.390 sedangkan Sasaran ke Dua dengan tiga Indikator yaitu indikator Pertama Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu, Indikator Ke dua Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu kedua indikator ini sama-sama dalam Program pengelolaan Keuangan Daerah dengan Anggaran Rp. 480.235.129.590 , Indikator Ketiga Asset Manajemen dengan Program Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 1.449.164.630 jadi total keseluruhan dalam Perubahan Anggran Tahun 2021 sebesar Rp. 525.282.793.610



Scan QR Barcode
Untuk Melihat Perjanjian
Kinerja Perubahan
Tahun 2021



E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Standar Penilaian Kinerja

| Nilai % | Pencapaian |
|-------------------|---------------------------------|
| 110 ke atas | Sangat tercapai/Sangat berhasil |
| $90 \leq x < 110$ | Tercapai/Berhasil |
| $60 \leq x < 90$ | Cukup tercapai/Cukup berhasil |
| $x < 60$ | Tidak tercapai/Tidak berhasil |

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

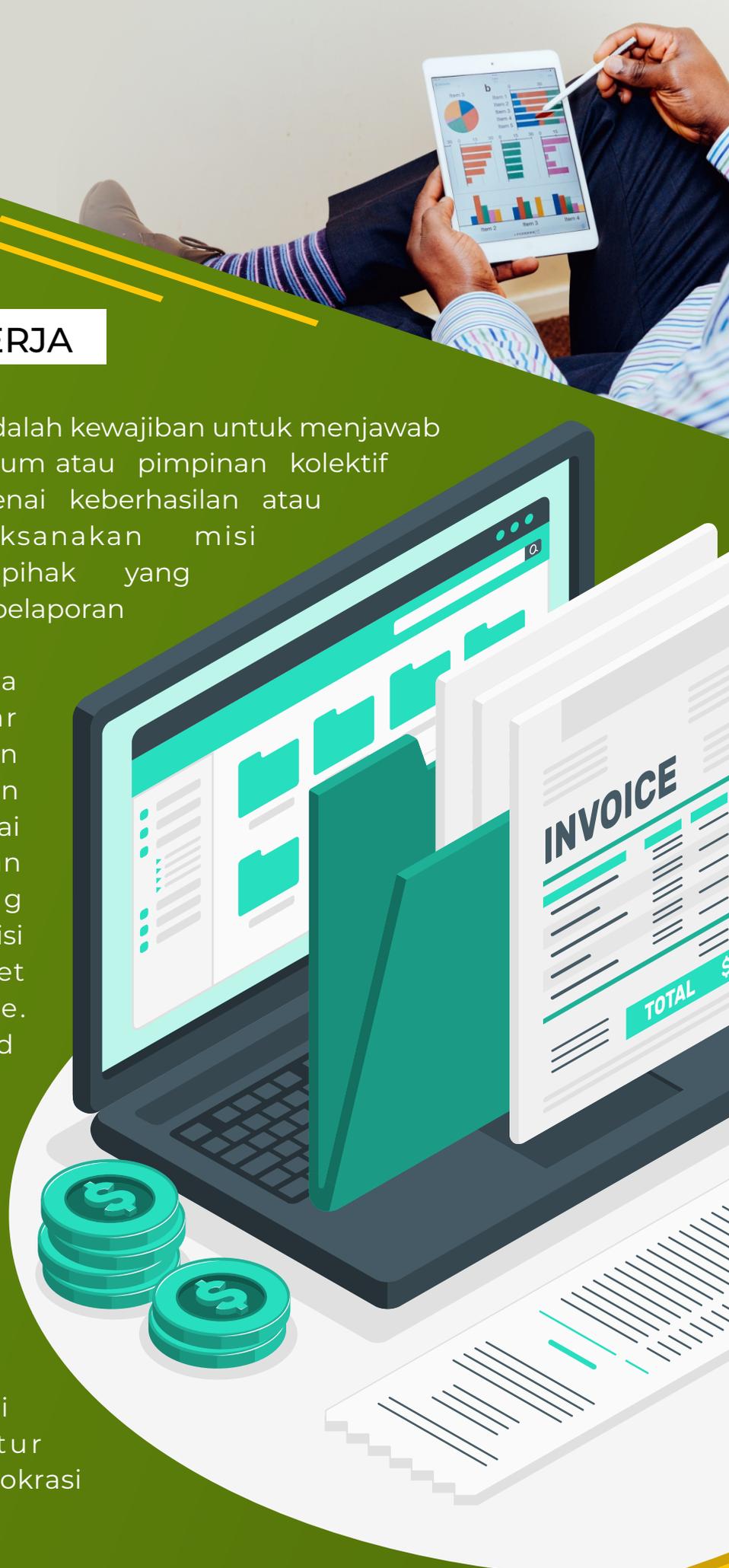
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun





2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Bone nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja BKAD pada tahun 2021 dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:

Tujuan : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan

Indikator Tujuan : Opini BPK-RI berdasatrkan hasil audit terhadap laporan keuangan pemeraintah daerah (LKPD)

Sasaran : 1 Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja dalam Pemerintahan Daerah dengan Indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Sasaran : 2 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dengan Indikator sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat waktu
2. Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat waktu
3. Asset Manajemen.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone maka Analisa yang dilakukan sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DATA AWAL 2021 | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA |
|--|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | 2021 | 2021 |
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan | | Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | WTP | WTP | - |
| | Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | BB | BB | - |
| | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu | 100 | 100 | 100 |
| | | Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 |
| | | Asset Manajemen | 99,17% | 99,85 | 99% |

Sumber Data :Laporan Realisasi Capaian Target Kinerja tahun 2021



Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan Bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkesinambungan dengan Indikator Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana dari Tahun sebelumnya 6 Kali Berturut- turut mendapatkan Nilai Opini WTP namun Pada tahun 2021 belum ada hasil Audit dari BPK-RI, begitupun dengan sasaran pertama Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah dengan Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan Tahun sebelumnya Mendapatkan Nilai BB namun pada Tahun 2021 belum ada hasil Penilain dari Inspektorat. Sedangkan sasaran Kedua sudah mencapai 100 persen dengan rata – rata hasil Yang diperoleh dari Tujuan / Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah 99,61% atau telah mencapai target.



2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2021

Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matriks sebagai berikut:

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 - 2021

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DATA AWAL 2018 | REALISASI KINERJA | | CAPAIAN KINERJA | |
|---|---|--|----------------|-------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih | | | | | | | |
| | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan | 99 | 99,17 | 97,19 | 99,17 | 99,35 |
| | Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat | 77 | 77 | 78 | 77 | 86,95 |
| | | Predikat SAKIP BPKAD atas Hasil Evaluasi Inspektorat / Kemenpan RB | B | B | BB | B | BB |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DATA AWAL 2021 | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA |
|--|---|---|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2021 |
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan | | Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | - | - | - |
| | Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | - | - | - |
| | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu | 100 | 100 | 100 |
| | | Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 |
| | | Asset Manajemen | 99,17% | 99,85 | 99% |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target Relisasi Kinerja dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan dalam mencapai Opini pada Tahun 2021 belum ada Hasil Penilaian dari BPK –RI, begitupun juga dengan Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP pada Tahun 2021 juga belum ada hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah, namun bila disandingkan dengan Tahun sebelumnya Tujuan dari Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Telah mencapai Opini WTP sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 sedangkan pada sasaran ke dua dengan 3 indikator sebagai berikut:

Sumber Data : Laporan Realisasi Kinerja tahun 2021



Indikator pertama, Penyusunan dan Penetapan APBD/ Perubahan APBD tepat Waktu, dalam penyusunan penetapan APBD ini paling lambat 30 November tahun berkenaan sedangkan perubahan APBD paling lambat 30 September tahun berkenaan, dalam Target Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada Tahun 2021 telah mencapai target dengan tepat Waktu, dan bila disandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020 realisasi kinerja dan capaian kinerja tepat Waktu.



Indikator Kedua, Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat waktu. Laporan keuangan daerah sesuai ketentuan merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD untuk diAudit BPK paling Lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun, dalam realisasi kinerja dan target kinerja pada indikator penyusunan Laporan ini telah menyelesaikannya dengan tepat waktu.



Indikator ketiga Asset Manajemen, Laporan hasil Evaluasi dan Nilai Potensi Aset daerah dengan data daftar asset tetap, menyusun laporan secara manual, proses inventarisasi asset tahunan, Nilai asset tercantum dalam Laporan Anggaran dalam realisasi kinerja pada tahun 2021 telah mencapai target sebesar 99,85 % sedangkan capaian kinerja sebesar 99% bila disandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan dalam pengelolaan asset barang milik daerah.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DATA AWAL 2018 | REALISASI KINERJA | |
|---|---|--|----------------|-------------------|-------|
| | | | | 2019 | 2020 |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih | | | | | |
| | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD | WTP | WTP | WTP |
| | | Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan | 99 | 99,17 | 97,19 |
| | Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat | 77 | 77 | 80 |
| | | Predikat SAKIP BPKAD atas Hasil Evaluasi Inspektorat / Kemenpan RB | B | B | BB |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DATA AWAL 2020 | REALISASI KINERJA | | |
|--|---|---|----------------|-------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan | | Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | WTP | - | - | - |
| | Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | BB | - | - | - |
| | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu | 100 | 100 | - | - |
| | | Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu | 100 | 100 | - | - |
| | | Asset Manajemen | 99,19% | 99,85 | - | - |

Sumber Data : Realisasi Kinerja Tahun 2021

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

| TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | % CAPAIAN | RATA - RATA CAPAIAN | PREDIKAT | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | >110 | 90=<=s/d<110 | 60=<=s/d<90 | <60 |
| | | | | SANGAT BERHASIL | BERHASIL | CUKUP BERHASIL | TIDAK BERHASIL |
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan | Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | 100 | WTP | | √ | | |
| Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dalam Pemerintahan Daerah | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | 100 | BB | | √ | | |
| Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu | 100 | 100 | | √ | | |
| | Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu | 100 | 100 | | √ | | |
| | Asset Manajemen | 100 | 100 | | √ | | |

Sumber Data : Realisasi Capaian Target tahun 2021

Berdasarkan data diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam Mencapai tujuan yaitu Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan dengan dua Sasaran dan Lima Indikator maka perbandingan yang dicapai antara Realisasi Kinerja dan target Jangka Menengah Renstra telah mencapai target ,pada sasaran kedua belum ada Penilaian dari Inpektorat daerah namun pada tahun sebelum telah mencapai target dengan nilai BB begitupun juga dengan Opini tahun sebelumnya telah mendapatkan nilai WTP dari tahun 2019 sampai tahun 2020.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:



Berdasarkan data diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkesinambungan dengan Indikator Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana dari Tahun sebelumnya 6 Kali Berturut- turut mendapatkan Nilai Opini WTP namun Pada tahun 2021 belum ada hasil Penilaian, begitupun dengan sasaran pertama Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah dengan Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan Tahun sebelumnya Mendapatkan Nilai BB namun pada Tahun 2021 belum ada hasil Penilaian dari Inspektorat. Sedangkan sasaran Kedua sudah Mencapai 100% dengan Rata – rata Hasil Yang diperoleh dari Tujuan / Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Adalah Mencapai Predikat dengan Hasil Yang *Baik*.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | | EFISIENSI SUMBER DAYA |
|--|---|---------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | CAPAIAN (%) | % |
| a | b | c | d | e (d/c x100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan | Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | WTP | | | 525,282,793,610 | 438,117,912,371 | 83.42 | |
| Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dalam Pemerintahan Daerah Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | BB | | | 43,598,499,390 | 40,972,604,910 | 93.98 | |
| | Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 3,052,834,800 | 2,886,971,462 | 94.57 | 5.46 |
| | Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 477,182,294,790 | 392,922,369,098 | 82.34 | 17.66 |
| | Asset Manajemen | 100 | 99,85 | 99,85 | 1,449,164,630 | 1,344,599,854 | 92.78 | 7.22 |

Sumber Data : Realisasi Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas maka dalam rangka mencapai kinerja sasaran Pertama dengan Indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 43.598.499.390 dan Relisasi Anggaran sebesar Rp.40.972.604.910 dengan capaian rata-rata sebesar 93,98 % telah dilaksanakan secara Efisien, namun dalam Penilaian SAKIP oleh APIP belum ada hasil nilai dari Inspektorat Daerah. Begitupun juga dengan sasaran ke Dua dengan 3 Indikator Indikator Pertama Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu , Indikator Kedua Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu dan Indikator ke tiga Asset Manajemen , ke tiga Indikator ini didukung dengan dua Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan



Berdasarkan Tabel diatas maka dalam rangka mencapai kinerja sasaran Pertama dengan Indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 43.598.499.390 dan Relisasi Anggaran sebesar Rp.40.972.604.910 dengan capaian rata-rata sebesar 93,98 % telah dilaksanakan secara Efisien, namun dalam Penilaian SAKIP oleh APIP belum ada hasil nilai dari Inspektorat Daerah. Begitupun juga dengan sasaran ke Dua dengan 3 Indikator Indikator Pertama Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu , Indikator Kedua Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu dan Indikator ke tiga Asset Manajemen , ke tiga Indikator ini didukung dengan dua Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 3.052.834.800 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.886.971.462 dengan rata-rata capaian sebesar 94,57 % , Indikator Kedua Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 477.182.294.790 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 477.182.294.790 dengan rata-rata capaian sebesar 82,34 % dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Indikator Asset Manajemen pagu Anggaran sebesar Rp. 1.449.164.630 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.344.599.854 dengan rata-rata capaian sebesar 92,78% telah dilaksanakan dengan Efisien.

6. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

| TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) | RENCANA TINDAK LANJUT |
|--|---|-------------|--|---|---------------|---------------|-------------|-----------------------|
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan | Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | 100 | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dalam Pemerintahan Daerah | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | 100 | | | | | | |
| | Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu | 100 | | | | | | |
| | Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu | 100 | | | | | | |
| | Asset Manajemen | 100 | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA | Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah | 1 | 1 | 100 | |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran | 0.17 | 0.17 | 100 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah disusun | 0.03 | 0.03 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang telah disusun | 0.01 | 0.01 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang telah disusun | 0.01 | 0.01 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang telah disusun | 0.01 | 0.01 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Realisasi Kinerja SKPD yang telah disusun | 0.07 | 0.07 | 100 | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0.04 | 0.04 | 100 | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran | 0.12 | 0.12 | 100 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS yang menerima Gaji setahun Anggaran | 0.12 | 0.12 | 100 | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat | 1.22 | 1.22 | 100 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1.1 | 1.1 | 100 | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Kegiatan Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang undangan | 0.01 | 0.01 | 100 | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran | 599.41 | 599.41 | 100 | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang telah disediakan | 0.15 | 0.15 | 100 | |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang telah disediakan | 0.12 | 0.12 | 100 | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang telah disediakan | 0.2 | 0.2 | 100 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Cetak dan Penggandaan | 587.42 | 587.42 | 100 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan | 0.12 | 0.12 | 100 | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah SPDP yang telah mengikuti Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.1 | 1.1 | 100 | |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya | 0.43 | 0.43 | 100 | |
| | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Kebutuhan Mebel | 0.15 | 0.15 | 100 | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan dan Peralatan Mesin | 0.28 | 0.28 | 100 | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran | 36.23 | 36.23 | 100 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyedia Surat | 34.67 | 34.67 | 100 | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Yang di Bayarkan | 0.36 | 0.36 | 100 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Dokumen Pelayanan yang ditelpkan tepat Waktu | 1.2 | 1.2 | 100 | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan | 0.89 | 0.89 | 100 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Laporan Pajak | 0.45 | 0.45 | 100 | |
| | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Pemeliharaan Mebel | 0.01 | 0.01 | 100 | |

| TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) | RENCANA TINDAK LANJUT |
|----------------------------|-------------------|-------------|---|--|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Kebutuhan Alat Mesin | 0.4 | 0.4 | 100 |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor | 0.03 | 0.03 | 100 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Ketepatan Waktu Penetapan APBD sesuai Ketentuan | 1 | 1 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 0.18 | 0.18 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Penyusunan KUA dan PPAS | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Penyusunan RKA – SKPD yang telah di verifikasi | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD | Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA –SKPD yang telah diverifikasi | 0.01 | 0.01 | 100 | |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Penyusunan DPA- SKPD yang telah di Verifikasi | 0.01 | 0.01 | 100 | |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA –SKPD yang telah diVerifikasi | 0.01 | 0.01 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan Pertanggungjawaban Perda Itg Perubahan APBD dan Peraturan kepala daerah ttg Penjabaran Perubahan APBD | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Penyusunan Regulasi Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Sisa Anggaran terhadap total belanja dalam APBD | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembinaan Penganggaran Daerah | 0.01 | 0.01 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 148.11 | 148.11 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | 75 | 75 | 100 | |
| | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah SPD yang diterbitkan | 72.61 | 72.61 | 100 | |
| | | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Dana Perimbangan Transfer yang telah di asistensi dan disinkronisasi, supervise, monitoring, dan di Evaluasi | 0.12 | 0.12 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 0.12 | 0.12 | 100 | |
| | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Laporan Rekonsiliasi Data dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait | 0.12 | 0.12 | 100 | |
| | | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan Pertanggungjawaban Kegiatan | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota | 0.12 | 0.12 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 0.24 | 0.24 | 100 | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang telah dilaksanakan | 0.04 | 0.04 | 100 | |
| | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 0.04 | 0.04 | 100 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala daerah ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/ Kabupaten/Kota | 0.04 | 0.04 | 100 | |
| | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban terhadap Anggaran PAD dalam APBD | 0.04 | 0.04 | 100 | |
| | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah disusun | 0.04 | 0.04 | 100 | |
| | | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota | 0.04 | 0.04 | 100 | |
| | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota | 0.07 | 0.07 | 100 | |
| | | | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyaluran Bantuan | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Darurat Mendesak | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota | 0.02 | 0.02 | 100 | |

| TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) | RENCANA TINDAK LANJUT |
|----------------------------|-------------------|-------------|---|--|--|---------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 0.01 | 0.01 | 100 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar (%) | 0.32 | 0.32 | 100 | |
| | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah | 0.04 | 0.04 | 100 | |
| | | | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Dokumen Analisis Standar Satuan Harga | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen daftar Aset dalam Kebutuhan Barang Milik Daerah yang telah disusun | 0.04 | 0.04 | 100 | |
| | | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah disusun | 0.06 | 0.06 | 100 | |
| | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan SKPD yang di nilai dalam proses Inventarisasi aset tahunan | 0.1 | 0.1 | 100 | |
| | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang telah disusun dan direkonsiliasikan | 0.02 | 0.02 | 100 | |
| | | | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota | Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota | 0.02 | 0.02 | 100 | |

Sumber Data : Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah telah mencapai target indikator utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 525.282.793.610,- Realisasi sebesar Rp. 437.805.245.962,- atau 83,35% dengan target 100% telah **Berhasil** tercapai sebesar 100% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota , mempunyai 7 (tujuh) Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian target kinerja 100%
- Program Pengelolaan keuangan Daerah dengan 4 Kegiatan dan 28 Sub kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100%.
- Program Pengelolaan barang Milik Daerah mempunyai 1 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100%.

7. Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2021 dengan melalui analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:



- 1) Memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan
- 2) Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah dinilai baik.
- 3) Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang secara konsisten terutama dengan memperhatikan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan,
- 4) Melakukan perbaikan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati terkait biaya pelayanan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah kerja Kabupaten Bone, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan mendatang lebih baik.
- 5) Meningkatkan kedisiplinan, etos kerja dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent (pelayanan prima) khususnya bagi petugas pelayanan/Frontline yang melayani masyarakat secara langsung serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan, disiplin kerja, jiwa melayani yang tulus dan mendapatkan dukungan keluarga.
- 6) Memberikan pelatihan keterampilan dan motivasi untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas pelayanan.
- 7) Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan, dengan mengoptimalkan media yang sudah ada untuk diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website OPD pelayanan publik, Situs resmi Pemerintah Kabupaten Bogor, Facebook, Twitter , telepon , SMS center, Email, dan lain sebagainya
- 8) Memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada petugas yang berprestasi dan terus memotivasi untuk



mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

- 9) Mempedomani dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta membuat dan Menindaklanjuti Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.

Walaupun pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 tercapai, berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang kinerja pelayanan BKAD yang berdaya guna dan berhasil guna, secara spesifik identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibagi berdasarkan fungsi – fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang anggotanya termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hasil koordinasi perencanaan keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRD.



Perbendaharaan Keuangan Daerah

Pengelolaan administrasi perbendaharaan yang tertib dan cepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Tertib dapat diartikan bahwa proses administrasi perbendaharaan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan SPM, SP2D harus memenuhi syarat kelengkapan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat berjalan dengan lancar

Pelaporan Keuangandan Aset Daerah

Raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Bone selama 6 kali sejak tahun 2016-2020 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggung jawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan APBD, sehingga public dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Bone.

8. Layanan Administrasi Perkantoran

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake holder lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.

- a. Standar Operasional Prosedur untuk masing - masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai

Tujuan : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah

Sasaran 1.2 : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan Anggaran sebesar Rp.525.282.793.610 sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp.438.117.912.371 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Realisasi Anggaran

| URAIAN | JUMLAH | | PERSEN |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan | | | |
| Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam Pemerintahan Daerah | | | |
| Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 43,598,499,390 | 40,972,604,910 | 93.98 |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 480,235,129,590 | 395,800,707,607 | 82.42 |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1,449,164,630 | 1,344,599,854 | 92.78 |
| TOTAL | 525,282,793,610 | 438,117,912,371 | 83.42 |

Sumber Data : Realisasi Anggaran Tahun 2021



Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam realisasi anggaran didukung oleh 2 sasaran dan 4 indikator sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah dengan indikator

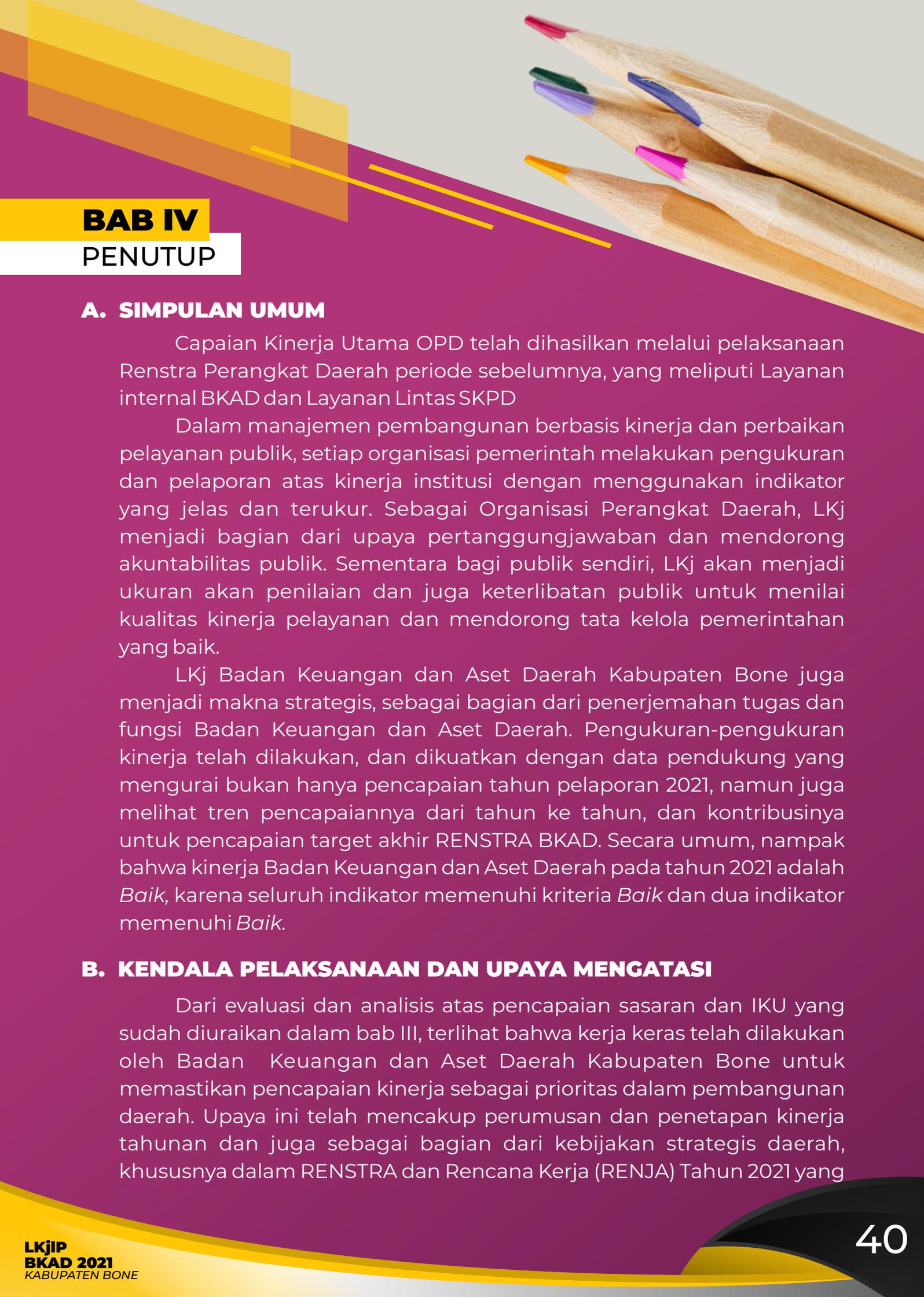
- 1.1 Indikator predikat SAKIP oleh APIP dengan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota , mempunyai 7 (tujuh) Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 43.598.499.390 dan Realisasi sebesar Rp. 40.972.604.910 dengan rata-rata capaian target realisasi 93,98%.

Sasaran 2

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang bersih, Transparan, dan Akuntabel secara berkesinambungan dengan indikator:

- 2.1 Indikator Penyusunan dan Penetapan APBD/ Perubahan APBD tepat waktu.
- 2.2 Indikator Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat waktu kedua indikator 2.1 dan 2.2 didukung oleh Program Pengelolaan keuangan Daerah dengan 4 Kegiatan dan 28 Sub kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.480.235.129.590 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 392.601.069.636 rata-rata capaian target realisasi sebesar 82,42%.
- 2.3 Indikator asset Manajemen dengan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai 1 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.449.164.630 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 1.344.599.854 rata-rata capaian target realisasi sebesar 92,78%.

Jumlah keseluruhan Anggaran Tahun 2021 Sebesar Rp. 525.282.793.610 dengan Realisasi Sebesar Rp. 437.805.245.862 dengan capai target realisasi sebesar 83,34%.



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Capaian Kinerja Utama OPD telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, yang meliputi Layanan internal BKAD dan Layanan Lintas SKPD

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone juga menjadi makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA BKAD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2021 adalah *Baik*, karena seluruh indikator memenuhi kriteria *Baik* dan dua indikator memenuhi *Baik*.

B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang



mencakup juga penentuan program/kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan dan Sub. Kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk pelayanan yang memperoleh beberapa penghargaan oleh Pemerintah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone ke depan. Dalam meningkatkan layanan pengelolaan keuangan, penatausahaan dan pengamanan aset daerah, dan peningkatan SDM Aparatur. Bagi instansi di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, serta pelayanan ditahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi



untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 merupakan laporan tahunan. Berdasarkan masalah dan isu strategis untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance serta meningkatkan kinerja BKAD Kab. Bone dimasa akan datang, perlu dirumuskan bersama indikator sasaran yang menjadi tolak ukur kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKAD Kab. Bone priode tahun 2018-2023.

Watampone, 14 Februari 2022
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BONE



M. NAZAMUDDIN, S.Sos., MM

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP :19631007 198611 1 002





LAMPIRAN :

1). *Matriks Renstra*



2). *Cascading Kinerja*



3). *Ringkasan Pengukuran Kinerja*

